

PERAN BAITUL MAL DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

M.Hafizd Haikal

NPP. 31.0018

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: mhafizdhaikal1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Nur Handayani, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Poverty is a problem experienced by almost every region. In an effort to reduce poverty, the government is trying to make people aware of the importance of distributing wealth. Therefore, Baitul Mal exists as an institution that manages religious assets and makes distributions to reduce poverty. Baitul Mal also provides skills training to those in need. However, in its implementation there is a lack of awareness in the distribution of zakat through Baitul Mal, a lack of budget needed to reduce poverty and the absence of regular donors. **Purpose:** This aims research to find out, analyze and describe the role of Baitul Mal in reducing poverty in Banda Aceh City as well as supporting, inhibiting factors and efforts to overcome inhibiting factors. **Method:** The research method is descriptive qualitative with an inductive approach. The theory used is the theory of Soerjono Soekanto. The technique used for data is interviews, documentation and observation, as well as determining informants for researchers using purposive sampling techniques, namely by determining informants deliberately by selecting people who are directly related to the focus of the research. **Findings:** The research results show that Baitul Mal does play an important role in reducing poverty, namely reducing the poverty rate by 1% with distribution training and donations given to the poor by Baitul Mal. **Conclusion:** However, in carrying out its role Baitul Mal is faced with a lack of public awareness in distributing zakat through official bodies, a lack of donors and many loans without repayment, as well as realization targets that have not been achieved. Efforts made are to carry out active outreach to the public both on social media and the real world, preparing a special budget for realization targets, and sanctions against people who do not comply with the rules. There needs to be a target number for activities, holding training for Aparatur Sipil Negara (ASN), and utilizing social media and modern media to expand the information provided related to services.

Keywords: *Baitul mal, Poverty, and Distribution*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir di alami oleh setiap daerah. Dalam usaha mengurangi angka kemiskinan ini pemerintah berupaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan penyaluran harta. Oleh sebab itu, Baitul Mal hadir sebagai lembaga pengelola harta agama dan melakukan penyaluran dalam mengurangi angka kemiskinan. Baitul Mal juga memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada kurangnya kesadaran dalam penyaluran zakat lewat Baitul Mal, kurangnya anggaran yang dibutuhkan dalam mengurangi angka kemiskinan dan tidak adanya donatur yang tetap. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran Baitul Mal dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Banda Aceh serta faktor pendukung, penghambat dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto. Teknik yang digunakan data adalah dengan wawancara, dokumentasi dan observasi, serta penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan penentuan informan yang dilakukan secara sengaja dengan memilih orang yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal memang berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, yaitu turunnya angka kemiskinan sebanyak 1% dengan pelatihan penyaluran serta sumbangan yang diberikan kepada Baitul Mal kepada orang miskin. **Kesimpulan:** Namun dalam melaksanakan perannya, Baitul Mal dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat lewat badan resmi, kurangnya donatur dan banyaknya pinjaman tanpa pengembalian, serta target realisasi yang belum tercapai. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat baik di sosial media maupun dunia nyata, menyiapkan anggaran khusus dalam target realisasi, dan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Sehingga perlu adanya jumlah target yang ditetapkan bersama di setiap program kegiatan yang diadakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga program kegiatan tersebut dapat dinilai keberhasilannya. Perlu adanya jumlah target untuk kegiatan ,mengadakan pelatihan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Memanfaatkan media sosial maupun media informasi untuk memperluas informasi yang diberikan terkait dengan pelayanan

Kata Kunci: Baitul Mal, Kemiskinan, dan Penyaluran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sesuatu yang sering didengar di kalangan masyarakat dan merupakan masalah yang umumnya terjadi di banyak wilayah. Kemiskinan atau miskin adalah kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kemiskinan juga merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. “

Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan” Harlik (2013). “Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan” Septyana (2013). Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) “Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kultural, struktural, dan sistemik (Kasim, 2006). “Ciri-Ciri yang Melekat pada Penduduk Miskin yaitu: 1. Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan (2) Tidak Memiliki pekerjaan tetap, (3) Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, (4) Tidak memiliki tempat tinggal, (5) tidak terpenuhinya standar gizi minimal.” Menurut Amarta sen (1987) dalam Houghton dan Shahidur (2012) kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi di seluruh dunia. Indonesia Masuk kedalam 100 besar negara termiskin di dunia, sedangkan Indonesia sendiri berada pada peringkat ke 73 dari data World Bank. *(Global Finance 2023)* Sehingga kemiskinan merupakan dinamika yang harus dihadapi serius oleh semua pihak. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia sebesar 4,71 orang. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan. Hal ini disebabkan karena kesenjangan sosial yang terjadi seperti upah minimum yang tidak memadai, pengangguran dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi. Provinsi Aceh sendiri termasuk kedalam salah satu provinsi yang memiliki permasalahan kemiskinan yang tertinggi se-pulau Sumatera. Aceh menjadi provinsi dengan peringkat ke 6 dengan kategori provinsi dengan persentase 14,46% penduduk miskin terbesar di Indonesia yang tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Aceh untuk mengurangi angka kemiskinan ini.

10 Provinsi Dengan Persentase Penduduk Miskin Terbesar

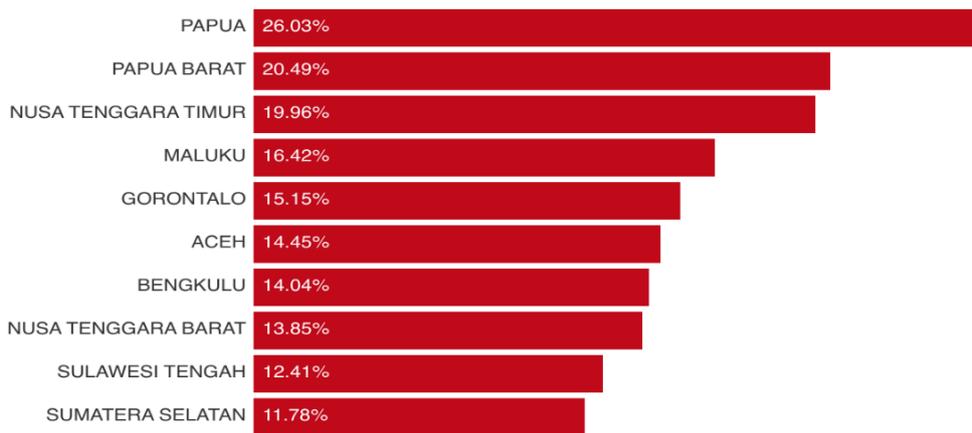
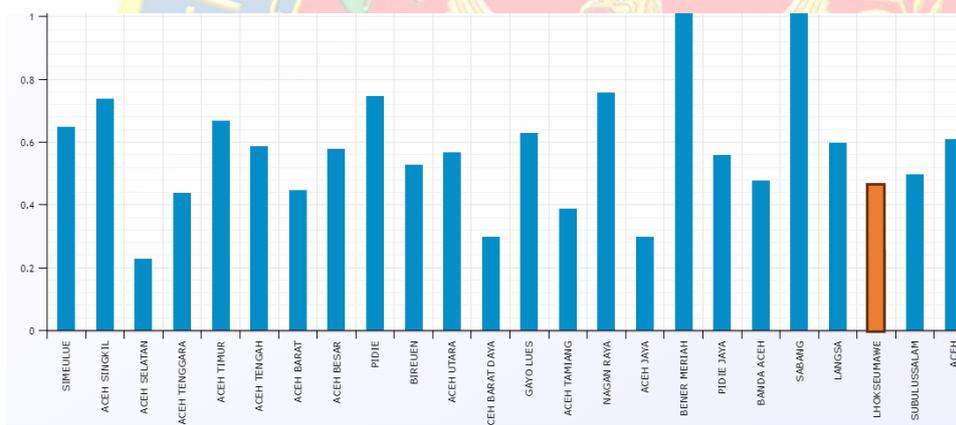


Chart: CNBC INDONESIA RESEARCH-AULIA • Source: BPS • Created with Datawrapper

Gambar 1.1 Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Terbesar

Sumber :CNBC Tahun 2021

Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh memiliki problematika terhadap kemiskinan. Kota Banda Aceh menghadapi permasalahan kemiskinan yang membuat Banda Aceh memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan berada di peringkat 19 dari 24 kota/kab yang lain di seluruh Aceh.



Gambar 1.2 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: BPS Provinsi Aceh 2022

Berdasarkan data BPS, Kota Banda Aceh termasuk kedalam daerah yang memiliki Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi pada tahun 2022. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Data Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Uraian Penduduk Miskin	Penduduk miskin di Kota Banda Aceh	
	2020	2021
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	18,97	20,95
Penduduk Miskin (%)	6,90	7,61
Garis Kemiskinan (Rp)	674977,0	698617,00

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 7,61%. Lalu di tahun 2020 tahun dimana jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada posisi terendah yaitu hanya 18,970 jiwa atau 6,90 persen. Jumlah ini merupakan angka terendah yang pernah dicapai masyarakat Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 6 tahun. Namun, jumlah penduduk miskin kembali meningkat akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi lumpuh total dan banyak usaha masyarakat yang gagal dan pengangguran meningkat secara signifikan. Tetapi, pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan tajam sebanyak 20.950 jiwa dibandingkan tahun 2020. (BPS Kota Banda Aceh 2022)

Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Aceh memiliki perbedaan yaitu dengan penegakan syariat islam yang lebih ketat dibandingkan dengan kota lain di Aceh. Sebagai pusat aktivitas pendidikan, kesehatan, sekaligus pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Banda Aceh. Adanya penerapan asas desentralisasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berada di bawah pemerintahan memiliki status istimewa dan hanya berada di provinsi Aceh, dimana berfungsi untuk:

1. pendataan muzakki dan mustahiq
2. pengumpulan zakat
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama
4. penyaluran dan pendistribusian zakat
5. pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif
6. pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam
7. penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama
8. pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah

Selain itu Baitul Mal juga memberikan pelatihan dalam bentuk mesin jahit, sevice handphone dan juga montir. Penyaluran diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Daerah Istimewa. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki peran dalam penuntasan kemiskinan. Bentuk peran yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah penyaluran beras dan uang tunai kepada fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan.(Baitul Mal Kota Banda Aceh,2023)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya Baitul Mal Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa masalah sehingga menghambat berjalannya peran tersebut. Kurangnya kesadaran dalam melakukan penyaluran zakat lewat Baitul Mal menjadi kelemahan bagi Baitul Mal dikarenakan masyarakat memilih menyalurkan harta mereka secara mandiri. .(Baitul Mal Kota Banda Aceh,2023) kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh Baitul Mal untuk mengurangi angka kemiskinan, dan Masalah yang terakhir yaitu tidak adanya donatur yang tetap sehingga penyaluran terhadap orang yang membutuhkan dan berada di kawasan Kota Banda Aceh tidak terlaksana dengan baik .(Baitul Mal Kota Banda Aceh,2023)

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran sebuah instansi dalam melaksanakan tugasnya serta hasil dalam pelaksanaan peran instansi tersebut . Muslim Sabarisman (Jurnal:2015) judul *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi* menemukan bahwa peran Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam program penanggulangan kemiskinan belum optimal. Program penanggulangan kemiskinan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, hal ini tentu mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Sosial Kota Sukabumi. Penelitian M.Ramadhani, Sarbaini, dan Harpani Matnuh menjelaskan bahwa program penanggulangan anak jalanan Kota Banjarmasin berupa, penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan berupa pendidikan keterampilan yang mengarah kepada keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu, Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan sikap yang menekankan kepada pendidikan mental disiplin (M.Ramadhani, Sarbaini, dan Harpani Matnuh, 2016). Penelitian Muh Nurdin, St Nurmaeta, dan Muhammad Tahir menemukan bahwa Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah melaksanakan pelatihan petani jagung berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam (Muh Nurdin, St Nurmaeta, dan Muhammad Tahir, 2014). Penelitian Trisnani selanjutnya berkaitan dengan Kelompok informasi Masyarakat (KIM) dikatakan masih rendah karena petugas KIM dalam mencari informasi belum maksimal, kategori berperan apabila di atas rata-rata 50% dalam mencari informasi. Pencarian Informasi yang dominan, informasi pendidikan dan kebudayaan, menjadi informasi yang penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak di usia sekolah sebagai generasi penerus dan masa depan. Mengelola informasi untuk bahan diskusi dalam pertemuan KIM, Informasi yang penting dan perlu diketahui masyarakat, oleh petugas KIM dibagikan ke masyarakat, bisa melalui fasilitas yang ada seperti papan pengumuman, dan selebaran serta KIM sebagian besar belum memiliki usaha (Trisnani,2017). Berdasarkan hasil penelitian Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru tentang Pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di kota Tomohon di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda berjalan baik (Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Baitul Mal sebuah lembaga SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) yang merupakan SKPA khusus yang ada di Aceh yang melayani penyaluran dan penerimaan ZIS peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Baitul Mal dalam mengurangi Angka Kemiskinan melalui program penyaluran dan penerimaan Zakat yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara, yang juga berbeda dengan penelitian Muslim Sabarisman, Trisnani, Muh nurdin dkk . Selain itu SKPD yang diteliti Cuma satu satunya ada di Provinsi Aceh yang teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran terbagi atas dua, yaitu hak dan kewajiban yang terdapat beberapa indikator yaitu ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, dan jumlah pegawai yang merupakan indikator atau dimensi dari hak. Sedangkan indikator maupun dimensi dari kewajiban terdiri dari empat tahap, yaitu visi dan misi, tupoksi, program, koordinasi dan sosialisasi .

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran Baitul Mal, faktor pendukung, mengurangi faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Banda Aceh.

II. METODE

Desain penelitian atau metode penelitian menurut Simangunsong (2017: 178) “Diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori peran menurut Soekanto (2012), menurutnya, seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya telah melaksanakan suatu peran. Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Di mana peneliti menggunakan konsep teori yang sudah ada untuk merumuskan hipotesis, kemudian diserasikan dengan pengumpulan data dan fakta di lapangan. Simangunsong (2017:215-218) sumber data terbagi antara lain: (1) “Sumber data berupa orang yang dapat memberikan informasi secara lisan melalui wawancara”. (2) “Sumber data lokasi atau keadaan sekitar lokasi penelitian misalnya (ruang kantor, sarana dan prasarana)” (3) “Sumber data berupa angka, gambar serta simbol berupa dokumen (paper) yang relevan dengan kajian penelitian”.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. (I. Nurdin & Sri, 2019) menyebutkan “bahwa wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.” Observasi menurut (Simangunsong, 2017) yaitu “kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian, dan hasil dari observasi tersebut berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, maupun perasaan emosi seseorang.” (I. Nurdin & Sri, 2019) menyatakan” Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.” Peneliti juga memberikan analisis untuk memperkuat data sehingga dapat dijadikan perbandingan sehingga timbullah kelemahan dalam suatu instansi/unit di tempat peneliti meneliti. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Sekretariat Dinas, Kepala Sub Bagian Umum, Aset & Kepegawaian Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kepala Sub Bagian

Peng. Info Dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kasubbag Keuangan, Program, dan Pelaporan, Tenaga Profesional sebanyak 2 orang dan Masyarakat Miskin sebanyak 2 orang.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Baitul Mal dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status seseorang pada saat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan orang tersebut ,yaitu pada saat memenuhi kewajiban peran tersebut.” Status, di sisi lain adalah kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, dan jika seseorang memiliki hak dan kewajiban, orang itu menjalankan fungsi sesuai dengan peranannya. Menurut Thoha (2003:27) dalam bahasa organisasi, “Peran berasal dari uraian tugas. Uraian tugas berisi dokumen tertulis yang berisi persyaratan dan tanggung jawab suatu pekerjaan”. Selanjutnya menurut Thoha, “Peranan berkaitan dengan 3 (tiga) fungsi, yaitu fasilitas, koordinasi, pembinaan kelembagaan, pendampingan, dan pelatihan. Seseorang atau lembaga berpedoman pada tugas atau jabatan dalam kedudukannya”. Menurut Roesmidi dan Risyanti (2006:57) ”Peran adalah aspek dinamis dari suatu organisasi yang merepresentasikan sistem suatu organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah” Ahmadi (2007:106). ”Percaya bahwa peranan adalah sebuah penghargaan tentang bagaimana individu harus berperilaku sesuai dengan status dan fungsi sosialnya dan dalam situasi tertentu”. Lebih jauh Ahmadi (2007:106) menjelaskan bahwa peranan tersebut terbagi dua, yaitu:

1. Peran sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.
2. Peran perseorangan yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat khusus dari individu itu sendiri.

Menurut teori di atas, konsep berpikir muncul bahwa tanpa adanya kedudukan maka tidak akan ada kedudukan. Dengan status atau kedudukan yang dimiliki seseorang , akan mempengaruhi peran yang harus dilakukan. Apabila tidak terjadi keselarasan antara kedudukan dengan peranannya, maka akan menimbulkan permasalahan yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Peran sangat erat kaitannya dengan nilai dan norma kehidupan yang tumbuh di masyarakat. Jadi, jika menilai arti peran dalam kehidupan bermasyarakat maka dapat dilihat dari nilai dasar sebagai pondasi awal dan berjalannya organisasi yang berlaku. Narwoko dan Bagong Hendopuspito (2014:160) berdasarkan bagaimana peran sosial digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*)

Metode ideal dalam melaksanakan peran berdasarkan penilaian masyarakat mensyaratkan bahwa peran harus dilakukan dengan hati-hati dan peranan tidak dapat dinegoisasikan dan harus dilaksanakan seperti ketentuan. Jenis peranan ini meliputi peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan lain sebagainya.

2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*)

Yaitu bagaimana peranan itu sebenarnya dilaksanakan .peranan ini memiliki yang lebih luas dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang diadaptasimungkin tidak sesuai dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis penelitian yang telah peneliti lakukan menggunakan teori peran menurut Soekanto (2012) terdapat dua dimensi yaitu dimensi Hak dan Kewajiban, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Hak

1. Ketersediaan anggaran

Dalam melaksanakan perannya, suatu instansi memerlukan anggaran atau dana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting. Dengan mengetahui anggaran yang disediakan maka dapat mengetahui seberapa banyak anggaran yang dimiliki sehingga dengan anggaran yang ada dapat mempercepat segala proses dalam fungsi Baitul Mal terutama dalam mengurangi kemiskinan.

2. Ketersediaan fasilitas

Ketersediaan fasilitas merupakan modal awal pemerintah dalam menjalankan suatu program. Fasilitas yang memadai akan memudahkan pemerintah dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan. Selain itu fasilitas juga bisa menjadi ukuran maksimal atau tidaknya pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Fasilitas merupakan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga. Dalam menjalankan perannya Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki fasilitas yang memadai karena Baitul Mal memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dalam pengoperasian organisasi.

3. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang berada di Baitul Mal berjumlah 41 orang yang diisi 17 pegawai negeri sipil, 4 pegawai PPPK, dan 21 pegawai honorer. Jumlah pegawai yang banyak ini dapat mendorong hasil pelayanan dan meningkatkan kinerja Baitul Mal. Menurut peneliti dengan jumlah pegawai yang relatif banyak maka penyelenggaraan dan penyaluran dengan budaya kejujuran dan profesional akan berbuah menjadi hal baik tatkala kejujuran dan mereka akan amanah mengingat dana dan anggaran yang masuk ke dinas ini.

B. Kewajiban

1. Visi dan Misi

Visi dan misi yang dimiliki Baitul Mal disesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dikarenakan merupakan turunan langsung dan Baitul Mal merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah kewenangan Ibukota Banda Aceh. kinerja maupun visi dan misi dari Baitul Mal sejalan dengan visi dan misi Kota Banda Aceh yang masih menegakkan syariat Islam sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang membuat Aceh itu menjadi istimewa dalam Adat, Agama, dan Pendidikan. Dengan Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah "Terwujudnya Ummat yang Sadar Zakat, Pengelola Uang Amanah dan Mustahiq yang Sejahtera.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan anggaran dan fasilitas yang sudah diterima, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan tupoksinya dengan baik yaitu melakukan pendataan muzakki mustahiq, pengumpulan zakat, penyaluran, pendistribusian zakat, pembinaan, pendayagunaan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif

3. Program

Tujuan dari sasaran Baitul Mal sudah dirumuskan dalam rencana strategis (RENSTRA). Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi. Strategi merupakan rangkaian cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang didalamnya memuat kebijakan dan program-program kegiatan.

Kebijakan merupakan aturan-aturan yang dibuat melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan juga petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan terpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan misi instansi pemerintah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan padu untuk mendapatkan hasil yang dijalankan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerjasama dengan Masyarakat untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

4. Koordinasi

Baitul Mal tidak hanya bekerja sendiri sebagai satu kesatuan dengan organisasi perangkat daerah Baitul Mal bekerja sama dengan banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Bank Daerah tempat pengajian Al-Qur'an dan sekolah sekolah. Baitul mal juga berkoordinasi langsung dengan lembaga syariah seperti bank Aceh maupun koordinasi langsung dengan walikota terkait pembagian dana dan proses penyaluran zakat maupun infaq yang membutuhkan.

5. Sosialisasi

Sosialisasi pada umumnya dilakukan untuk memperkenalkan sesuatu kepada Masyarakat bisa dengan mengajak, menjelaskan hak maupun kewajiban, seperti halnya Baitul Mal yang melakukan sosialisasi kepada Masyarakat pentingnya zakat infaq dan sedekah bagi mereka. Kewajiban zakat, infaq, dan sedekah adalah hal yang wajib untuk dijalankan agar menyadarkan umat bahwa di Kota Banda Aceh wajib menyetorkan zakat kepada Baitul Mal

3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peran Baitul Mal dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh

A. Faktor Pendukung

Adanya donatur yang menyalurkan di Baitul Mal membuat angka penerimaan bertambah yang berujung pada keberhasilan Baitul Mal menekan angka kemiskinan sebesar 1%. dan akan terus naik didukung oleh donatur donatur yang ada di Baitul Mal. dana penyaluran yang diterima termasuk besar yang dialokasikan untuk penyaluran dan penyelenggaraan yang ada di Baitul Mal. Hal ini didukung oleh sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal serta diiringi adanya transparansi yang dilakukan oleh Baitul Mal dengan Anggaran yang telah ditetapkan sehingga menarik minat Masyarakat untuk dapat menyalurkan hartanya tidak secara mandiri.

B. Faktor Penghambat

Anggaran yang kurang juga menjadi permasalahan utama disini yang menyebabkan peran tersebut tidak berjalan dengan baik, anggaran yang kurang adalah senilai 3.831.646.414, namun selain anggaran yang kurang peneliti juga menemukan kurangnya transparansi yang ada di website maupun yang disampaikan secara langsung oleh Baitul Mal, diikuti dengan fasilitas seperti AC (*Air Conditioner*) serta atm beras yang hanya berjumlah satu buah, serta masyarakat yang menyalurkannya secara mandiri sehingga tidak tepat sasaran. Lalu yang meminjam uang di Baitul Mal harus ditegur lewat telpon maupun diberikan denda dan tenggat. Lalu kurangnya donatur tetap yang membuat proses penyaluran zakat terhambat, sehingga mempengaruhi target realisasi

anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang kurang juga menjadi permasalahan utama disini yang menyebabkan peran tersebut tidak berjalan dengan baik, anggaran yang kurang adalah senilai 3.831.646.414, namun selain anggaran yang kurang peneliti juga menemukan kurangnya transparansi yang ada di website maupun yang disampaikan secara langsung oleh Baitul Mal, diikuti dengan fasilitas seperti AC (Air Conditioner) serta ATM beras yang hanya berjumlah satu buah,serta masyarakat yang menyalurkannya secara mandiri sehingga tidak tepat sasaran. Lalu yang meminjam uang di Baitul Mal harus ditegur lewat telpon maupun diberikan denda dan tenggat. Lalu kurangnya donator tetap yang membuat proses penyaluran zakat terhambat, sehingga mempengaruhi target realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha ini adalah salah satu bentuk strategi yang begitu efektif, dan salah satu cara alternatif dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan salah satu cara dalam mengurangi faktor kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh guna mengubah para mustahiq tersebut menjadi muzakki. Yang menjadikan para muzakki tersebut pun lebih mempercayai lembaga zakat tersebut karena melihat bukti penyaluran dana yang begitu bermanfaat. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha ini adalah salah satu bentuk strategi yang begitu efektif, dan salah satu cara alternatif dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan salah satu cara dalam mengurangi faktor kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh guna mengubah para mustahiq tersebut menjadi muzakki. Yang menjadikan para muzakki tersebut pun lebih mempercayai lembaga zakat tersebut karena melihat bukti penyaluran dana yang begitu bermanfaat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran dari pemerintah dalam hal ini Baitul Mal dalam menyalurkan dan penerimaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) sangat berdampak terhadapnya angka kemiskinan. Namun dalam proses penyaluran ini sangat disayangkan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Baitul mal berkurang karna banyak yang tidak sesuai target dan realisasi. Salah satunya adalah banyak orang miskin yang tidak terdata sehingga harus dilaksanakan kepada mereka proses penyaluran dan juga kurangnya fasilitas seperti *Air Conditioner* (AC) serta fasilitas seperti ATM beras yang kurang. Namun selain itu Baitul Mal selain menerima dan menyalurkan ZIS juga memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin, rumah dan bantuan bahan pokok. Sehingga Baitul Mal menurut peneliti sangat berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Trisnani,2017) bahwa” petugas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mencari informasi belum maksimal dan informasi sangat dibutuhkan bagi peningkatan pengetahuan anak- anak di usia sekolah”. Di penelitian ini berfokus pada penyaluran dan penerimaan Zakat, Infaq dan sedekah itu untuk sehingga angka kemiskinan yang ada di Banda Aceh. Namun sama halnya dengan penelitian (Muh Nurdin dkk.,2014) bahwa pelatihan yang diberikan belum maksimal sehingga mengganggu proses akuntabilitas di Baitul Mal. Lalu berbeda dengan penelitian (Muslim Sabarisman,2015) di Banda Aceh sendiri kemiskinan menjadi salah satu program prioritas sehingga pemerintah lewat Baitul Mal melaksanakan program program demi mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, selaras dengan yang dikemukakan oleh (M.Ramadhani dkk.,2016) bahwa orang miskin sebaiknya diberikan pendidikan dan keterampilan agar terbebas dari kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut Soerjono Soekanto mencakup dua hal yaitu kewajiban dan hak namun dalam pengurangan angka kemiskinan tidak berjalan dengan baik dipengaruhi oleh

dimensi dari hak itu tersendiri dimulai dari ketersediaan anggaran yang kurang dari target maupun realisasi, kurangnya fasilitas yang memadai serta pegawai yang kurang berkompeten namun dari segi kewajiban yang berjalan dengan baik dengan didukung oleh turunnya angka kemiskinan di Banda Aceh sebesar 1%. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peran dalam mengurangi angka kemiskinan memiliki beberapa faktor pendukung yaitu adanya donasi dalam bentuk dana maupun bantuan yang diberikan oleh para masyarakat dan swasta. Sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan proses penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). namun Baitul Mal si kepada masyarakat akan pentingnya. Akan tetapi Hambatan yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah kurangnya tingkat kesadaran pada masyarakat untuk menyetorkan/menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, Kurangnya donatur tetap, adanya realisasi yang tidak tercapai, kurangnya fasilitas dan kurangnya sikap profesionalisme para pegawai Baitul mal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU DAN JURNAL

- Ahmadi, A. (2007). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurdin, I., & Sri, H. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Merode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Kuncoro. (2000). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik, Cetakan Pertama*. Bandung: ALFABETA
- Narwoko. (2014). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Prenada Media Group.Jakarta
- Roesmidi, H. dan R. Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprint Jatinangor, Sumedang
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung. Alfabeta.
- _____. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.
- _____. (2020). *Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia*
- Soerjono S. (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadan Badan Pusat Statistik Kota banda Aceh , (2019)
- Septyana, Hardhike. "Manajemen Pembelajaran Berbasis Kompetensi Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) FORTUNA Dukuh Siberuk Desa Siberuk Kabupaten Batang." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2.2 (2013).
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Harlik, H., Amir, A., & Hardiani, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 109-120.
- Hartanto, F.M. 1998. Modal Maya: Pengungkit Keunggulan Perusahaan di dalam Era Informasi. Orasi Ilmiah pada Sidang Terbuka Senat ITB. Penerbit ITB. Bandung, 15-21.
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947–954. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/744/648>

- Trisnani, (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987>
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Sabarisman, M. (2015). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi. *Sosio Konsepsia*, 4(3), 194–205. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.151>

